

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Arief, Nawawi, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2005.
- Atmasasmita, Romli, *Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan (Pasca UU No 30 Tahun 2014)*, Bandung: Alumni, 2015.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2009, Cetakan Ke-2.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Fredmen, Lawrence M. *American law and introduction, 2 and edition*, penerjemah Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pattatanusa, 2001.
- , *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Nusa Media, 2013.
- Friedrich, Joachim, dan Carl. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Fuady, Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012, Cetakan Ke-2.

-----, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

-----, *Kisi-Kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi didalam Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi* Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.

HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, Edisi Revisi.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.

Jaya, Putera, Sarikat, Nyoman, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

J.G., Brouwer dari Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1998.

Kansil, CST. at.all, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.

- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pranada Media Group, 2014.
- Latief, Abdul, Orasi Ilmiah *Penegakan Hukum Administrasi Pemerintahan dan Tindak Pidana Korupsi*, Makassar: Kampus UMI, 2015.
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Jakarta: cahaya Arma Pustaka, 2014.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009.
- Moeimam, Susi dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung : Alumni, 2008.
- , *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya* Bandung: Alumni, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008.
- Minarno, Basuki, Nur. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009.
- Nirwanto, Andhi, *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi* Bandung: Alumni, 2015.
- Parmono, Budi, “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Malang: Fakultas Hukum UB, 2011.

- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Putra, Rama. *Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Parmono Budi. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Malang: Fakultas Hukum UB, 2011.
- dan Ira, Thania, Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sabuan, Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Situmorang, Victor, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Stout HD, *De Betekenissen Van De Wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, cet. XI.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* Bandung: Alumni, 1981.
- Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Cetakan Ke-12.

Syahri, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti: 1999.

Thalib, Rasyid, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Tiena, Masriani, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cetakan Ke-2.

Victoria Bull. *Oxford Learner's Pocket Dictionary: Fourth Edition*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Wijayanto dan Zachrie, Ridwan. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan Perma, dan Putusan:

Undang-Undang Dasar 1945.

R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2013 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 977K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, hlm. 196-197, tanggal 10 Juni 2005.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1485K/Pid.Sus/2013, tanggal 2 Oktober 2013.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 263 K/TUN/2014 Tahun 2014 tentang perijinan antara I. Deputi Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, II. Tim BPKP Penerbit laporan has.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 25/G /2015/PTUN-MDN tahun 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor: 176/B/2015/PT TUN-MDN, tanggal 21 Desember 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn.
Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Jaksa Agung Nomor: 01/KB/I-VIII.3/07/2007 dan Nomor: KEP 071/A/JA/07/2007 tertanggal 25 juli 2007.

C. Kamus Ilmiah, Jurnal, Makalah, Lokakarya:

Abdul Latif, “*Jaminan Negara Hukum Dalam Proses Hukum Yang Adil*” dalam Varia Peradilan Tahun XXVII No. 320 Juli 2012.

Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. Jurnal Pro Justitia IV*. Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Fathudin, “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”, *Jurnal Cita Hukum Vol. II, No. 1*, (Juni 2015): 129, ISSN: 2356-1440.

Mahmud Mulyadi, “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (*Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8, No. 2*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia, Juni 2011): 219.dikutip Melalui Jurnal “*Arena Hukum*” Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.

Mohammad Sahlan, *Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 166-189 diakses melalui 166 DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.2>*, pada tanggal 17 Mei 2025.

Yulius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Vol. 04, No. 3*, November 2015.

Maiyasyak Johan, *Pertanggungjawabab Pidana Pemegang Jabatan Dalam Kaitan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2010.

Muladi, *Ambiguitas dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana: Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium*, Makalah diunduh di http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Makassar1820Maret2013/Ambiguitas_Dalam_Penerapan_Asas_Ultimum_Remedium-Prof.MULADI.pdf, hal., 1-2.

Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Centre For Human Rights, Medan: Hotel Grand Angkasa, 2011.

D. Media Elektronik/Internet:

Kompas, Putusan Hakim Mengacaukan, Sidang Praperadilan terkait Penetapan tersangka Oleh KPK, Edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, hal. 5, diakses melalui <http://ribazhambakung.com/bentuk-penyalahgunaan-wewenang-administrasi/>, pada tanggal 20 April 2025.

<https://www.budi-utomo/fakultas-hukum/2011/artikel/penyalahgunaan--wewenang--tindak--pidana--korupsi-indonesia>, pada tanggal 20 April 2025.

Togi Sirait, Sifar Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana, diakses melalui: <https://id.linkedin.com/pulse/sifat-melawan-hukum-dalam-pidana-togi-sirait>, Pada tanggal, 3 April 2025.

KBBI, “Arti dari Salah Guna, Menyalahgunakan”, kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan, diakses 8 Mei 2025.

Indriyanto Seno Adji, *Antara Kebijakan Publik*, melalui; <http://id.wiktionary.org/wiki/melampaui> wewenang, diakses pada tanggal, 20 April 2025.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara> di akses pada tanggal 16 April 2025.

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/konsep-penyalahgunaan-wewenang-dalam.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

<http://donny-tri-istiqomah.blogspot.co.id/2010/08/hukum-dan-moral-dari-hart-fuller-sampai.html> dalam bukunya Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven and London: Yale University Press, 1969), diakses, pada tanggal 9 Mei 2025.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, (1971), hal. 54-58 melalui <http://donny-tri-istiqomah.blogspot.co.id/2010/08/hukum-dan-moral-dari-hart-fuller-sampai.html>, diakses: pada tanggal, 10 Mei 2025.